PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 11 Februari 2017 Halaman: 13

PERSOALAN KLASIK KMS

Sejumlah warga mengeluhkan distribusi KMS yang tidak merata dan tak tepat sasaran.Ditengarai ada broker dalam pengurusan KMS, sehingga Banyak warga mampu justru menerima program pengentasan kemiskinan ini.

- Warga Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, menyatakan, sejauh ini pendistribusian KMS tidak merata.
- Warga berharap pemerintahan di bawah wali kota yang terpilih dapat semakin meratakan distribusi KMS. Diharapkan tak ada lagi warga kurang mampu yang tercecer dari daftar KMS.
- Komisi D DPRD Kota Yogya, mengaku baru mendapatkan informasi mengenai pembagian KMS yang tidak merata.
- Dewan menilai penanggulangan kemiskinan ini juga belum berjalan efektif.
- Pasalnya, Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik jumlah warga miskin mencapai 8,75 persen.
- Ini lebih tinggi dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016 yang menargetkan angka kemiskinan mencapai 8,4 persen.

GRAFIS/FAUZIARAKHMAN

Warga Bisa Lapor ke Kelurahan

KEPALA Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar menjelaskan, pihaknya telah menetapkan data penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dengan verifikasi. Verifikasi itu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ditetapkan berdasarkan indikator.

"Tidak ada pertimbangan dekat dengan seseorang sehingga menentukan lolos atau tidaknya seseorang menerima KMS," ujar Hadi, Jumat (10/2).

Dia menyatakan seseorang yang merasa tidak mampu dan tidak lolos dalam menerima KMS bisa mengecek nilai verifikasinya di Dinas Sosial. Menurut Hadi, sepanjang memenuhi kriteria dan nilainya memenuhi, maka seseorang akan menerima KMS.

Pihaknya pun mengatakan, keluhan terkait dengan KMS ini bisa dilaporkan melalui kelurahan masing-masing. Nantinya akan ada musyawarah

● ke halaman 14

Warga Bisa Lapor ke Kelurahan

● Sambungan Hal 13

kelurahan terkait verifikasi tersebut.

"Kami bisa menerima aduan. Nanti bisa lewat lurah atau RW yang sebelumnya mengusulkan," ujarnya.

Hadi Muhtar menyatakan telah merencanakan untuk mengubah parameter baru untuk menentukan penerima KMS. Nantinya, untuk penerima KMS akan mendapat kriteria baru, sehingga akan memperkecil potensi warga yang memaksakan untuk masuk dalam daftar penerima KMS.

"Usulan kriteria baru ini, nantinya akan disampaikan pada wali kota definitif setelah ditetapkan tahun ini," paparnya.

Adapun indikator yang saat ini dipakai ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Yogya Nomor 244/KEP/2012. Dalam keputusan tersebut ditetapkan tujuh aspek penilaian yang meliputi pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kendaraan, pendidikan, dan sosial. Dari tujuh aspek tersebut kemudian disesuaikan dengan 17 parameter yang ada. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005